

---

# Perlindungan bagi Perempuan Miskin dari KDRT

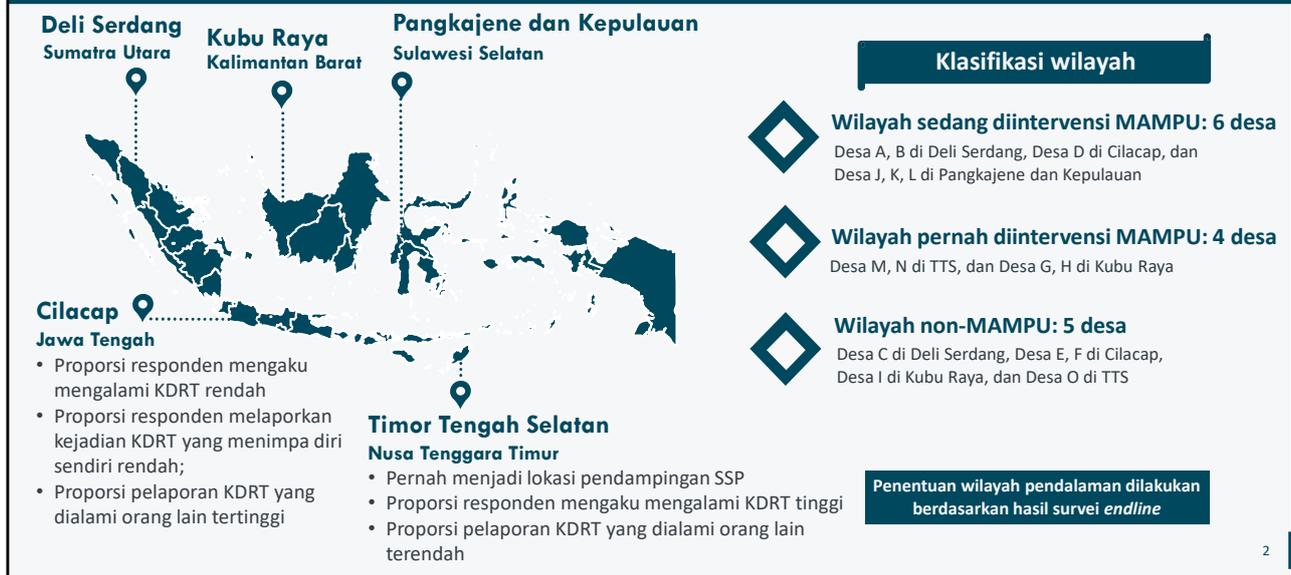
---

Senin, 28 September 2020



Kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang menjadi fokus dalam studi ini adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan miskin sebagai istri dan dilakukan oleh suami. Menurut data Komnas Perempuan, sebanyak 75% dari KtP merupakan KDRT, sehingga KDRT perlu mendapatkan perhatian serius. Fokus studi ini adalah layanan pelaporan korban KDRT yang merupakan pintu utama dari keseluruhan rangkaian layanan perlindungan bagi korban KDRT

**Studi dilakukan pada lima wilayah kabupaten. Pendalaman informasi kualitatif dilakukan pada dua wilayah, yaitu Cilacap dan TTS**



- Studi dilakukan pada 15 desa yaitu di kabupaten Deli Serdang, Cilacap, Kubu Raya, Pangkep dan TTS. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei rumah tangga di semua lokasi studi, dengan mewawancarai 469 perempuan berusia 17-40 tahun berstatus pernah menikah. Informasi dasar kualitatif yang menggambarkan kondisi desa terkait KDRT dikumpulkan dari semua lokasi studi melalui wawancara di tingkat desa, wawancara kepada mitra MAMPU di kabupaten dan FGD dengan perempuan miskin.
- Informasi pendalaman kualitatif dikumpulkan di Cilacap dan TTS melalui wawancara kepada P2TP2A dan unit PPA Polres di kabupaten, Polsek/Babhinkamtibmas, aktor pendorong dan penyedia layanan pelaporan KDRT serta perempuan korban KDRT yang pernah melaporkan KDRT. Informasi ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai akses perempuan miskin terhadap layanan pelaporan KDRT. Terdapat 3 kategori wilayah berdasarkan keberadaan mitra MAMPU yang bekerja pada isu KDRT, yakni (i) wilayah sedang diintervensi mitra MAMPU yaitu oleh Mitra Indonesia di Deli Serdang dan Aisyiyah di Cilacap dan Pangkep; (ii) wilayah pernah diintervensi mitra MAMPU yaitu oleh SSP di TTS dan PEKKA di Kubu Raya; (iii) wilayah tidak pernah diintervensi mitra MAMPU atau non MAMPU,,

## Ketersediaan dan kualitas layanan pelaporan KDRT tidak mengalami perubahan selama 2017—2019



3

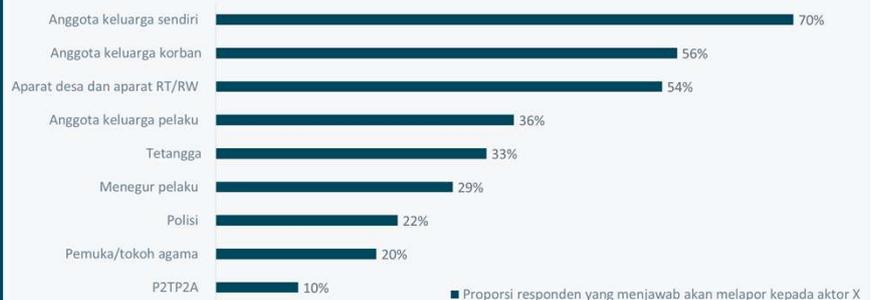
Studi ini menemukan bahwa ketersediaan dan kualitas layanan pelaporan KDRT di lokasi studi tidak mengalami perubahan selama 2017-2019

1. LSM mitra MAMPU memiliki kader atau membentuk komunitas di desa yang dapat dituju untuk pelaporan KDRT
2. Faktor yang memengaruhi pilihan aktor ini diantaranya adalah faktor kemampuan menyelesaikan masalah, kemudahan mengakses layanan, kepercayaan, serta kenyamanan/kedekatan personal.
3. Beberapa penyebabnya antara lain: 1) korban menganggap teguran terhadap pelaku KDRT cukup memadai tanpa perlu sanksi adat sebagaimana isi perdes, 2) adanya anggapan bahwa melaporkan KDRT ke pemdes akan dikenakan biaya, 3) sanksi adat yang harus dibayarkan oleh pelaku KDRT menurut tata aturan perdes cukup besar, sehingga pelaku dari keluarga miskin dinilai tidak mampu membayarnya, serta 4) keberadaan atau isi perdes yang juga belum diketahui atau dipahami dengan baik oleh masyarakat.
4. Upaya sosialisasi sudah dilakukan namun frekuensinya terbatas dan tidak selalu melibatkan seluruh aktor di tingkat desa. Akibatnya para aktor memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam menangani pelaporan KDRT.

'...ada perempuan korban kekerasan **takut ke pengadilan bayar, ke polisi bayar**, kita (P2TP2A) jelaskan semua gratis..takut pada proses persidangan.. korban tidak tahu...walau sidangnya relatif terbuka, tapi hanya orang yang berkepentingan yang boleh hadir' (wawancara P2TP2A Citra-Cilacap, Februari 2020)

'...di pemahaman masyarakat desa, **kalau lapor ke polisi, maka suaminya langsung ditahan**, padahal nggak seperti itu dan ini perlu pemahaman yang berkelanjutan' (wawancara P2TP2A Citra-Cilacap, Februari 2020)

## Hanya sedikit perempuan miskin yang mengaku akan melaporkan KDRT kepada layanan pelaporan KDRT yang berada di luar desa



Hasil survei memperlihatkan hanya sedikit perempuan miskin yang mengaku akan melaporkan KDRT kepada layanan pelaporan KDRT yang berada di luar desa, seperti kepada P2TP2A maupun kepolisian. Hal ini tidak terlepas dari, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman perempuan miskin mengenai layanan pelaporan KDRT.

**Perempuan miskin masih mengalami sejumlah hambatan dalam melaporkan KDRT, baik dari sisi penyedia layanan maupun dirinya sendiri**



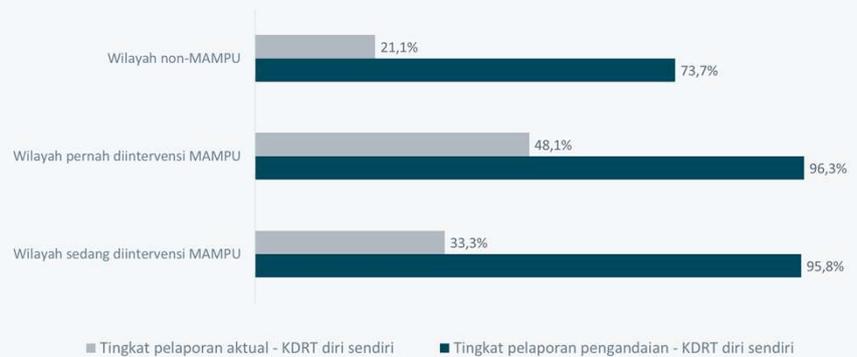
5

Perempuan miskin masih mengalami sejumlah hambatan dalam melaporkan KDRT. Studi ini menemukan bahwa:

1. (tidak ada notes)
2. KDRT dianggap masalah pribadi dan bahkan aib sehingga tidak seharusnya dicampuri oleh orang lain. Akibatnya, KDRT seringkali tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara internal keluarga.
3. Ada beberapa kegiatan kemasyarakatan di desa studi yang telah memuat sosialisasi isu KDRT, misalnya mimbar gereja, pengajian, PKK, rapat di dusun/desa, termasuk kegiatan yang diinisiasi oleh para mitra MAMPU di desa
4. Perempuan miskin memilih mediasi karena → kehendak pribadi ataupun karena dorongan dari keluarga dan aktor penyedia layanan. Meskipun mediasi dapat menjadi solusi, pada beberapa kasus mediasi berpotensi membuat korban tidak mendapat layanan lanjutan dan dapat memungkinkan terjadinya KDRT berulang

## Proporsi tingkat pelaporan KDRT oleh perempuan miskin lebih tinggi pada wilayah dampingan MAMPU

Sumber: hasil survei tim peneliti SMERU (N = 394)



**Pelaporan aktual** → tindakan nyata seseorang dalam melaporkan kejadian KDRT pada kurun waktu tertentu

**Pelaporan pengandaian** → sikap seseorang terhadap pelaporan KDRT, sebuah refleksi dari prinsip individu

6

Proporsi tingkat pelaporan KDRT actual dan pelaporan pengandaian oleh perempuan miskin lebih tinggi pada wilayah yang pernah dan sedang didampingi mitra MAMPU dibandingkan wilayah non MAMPU. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan miskin di wilayah MAMPU memiliki sikap yang lebih positif terhadap pelaporan KDRT dan hambatan pelaporan KDRT di wilayah MAMPU lebih sedikit. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan temuan ini adalah adanya intervensi yang pernah/ sedang dilakukan mitra MAMPU yang menasar perempuan di desa termasuk perempuan miskin

## Eliminasi faktor penghambat pelaporan KDRT penting dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan miskin pada layanan perlindungan KDRT



### Risiko

Perempuan miskin menghadapi sejumlah risiko yang menghambat mereka melaporkan KDRT



### Ekonomi

Faktor keterbatasan ekonomi menciptakan risiko pelaporan KDRT yang spesifik bagi kondisi perempuan miskin



### Sampai tingkat desa

Risiko tersebut mengakibatkan pelaporan KDRT oleh perempuan miskin berhenti di tingkat desa



### Tindak lanjut

Laporan yang diterima di desa tidak selalu ditindaklanjuti ke kecamatan/kabupaten

7

Eliminasi faktor penghambat pelaporan KDRT penting dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan perlindungan dari KDRT

1. Risiko yg dimaksud meliputi → risiko terkait kondisi ekonomi, psikologi, relasi keluarga dan anak
2. Misalnya: 1) ketergantungan finansial terhadap pelaku KDRT, dan 2) keterbatasan kemampuan untuk menyediakan biaya perjalanan dan komunikasi untuk mengakses layanan perlindungan di luar desa
3. (tidak ada notes)
4. Padahal tindak lanjut laporan KDRT ke tingkat di atas desa memungkinkan korban KDRT mendapatkan layanan perlindungan yang lengkap yang umumnya tidak tersedia di desa, misalnya: layanan pemulihan psikologi

## Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akses perempuan miskin terhadap layanan pelaporan KDRT?



Pembentukan **tim gabungan penanganan KDRT** agar solusi terhadap laporan KDRT dapat lebih komprehensif



P2TP2A dan perangkat desa dapat mengadakan **kegiatan kemasyarakatan** serta **kegiatan pemberdayaan ekonomi** untuk perempuan



Pelaksanaan **sosialisasi penanganan laporan KDRT yang intensif dan masif** kepada aktor desa yang sering dituju untuk pelaporan KDRT



P2TP2A dan Kepolisian dapat melakukan **sosialisasi prosedur melaporkan KDRT** dan tindak lanjutnya langsung kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami

8

Jadi, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki akses perempuan miskin terhadap layanan pelaporan KDRT.

Kami merekomendasikan beberapa langkah berikut:

1. Tim gabungan melibatkan aktor di tingkat desa-kecamatan-kabupaten
2. Hal ini penting untuk meningkatkan kemandirian finansial dan mendorong perempuan mengakses layanan pelaporan KDRT
3. (tidak ada notes)
4. Hal ini akan memudahkan internalisasi. Sosialisasi sebaiknya juga mengikutsertakan seluruh kelompok masyarakat termasuk laki-laki

# THANK YOU



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



The SMERU Research Institute



@SMERUInstitute



Tel: +62 21 31936336  
Fax: +62 21 31930850



Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta  
10330, Indonesia